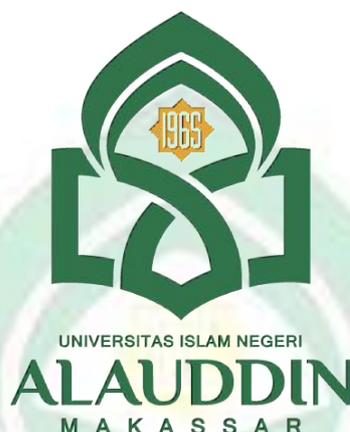


**PENGARUH PDRB, DANA DESA, DAN ALOKASI DANA
DESA TERHADAP KEMISKINAN
DI KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh:

H A R I R A H

NIM. 90300115042

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harirah
NIM : 90300115042
Tempat / Tgl.Lahir : Maros 16 Juli 1998
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Maros
Judul : Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Februari 2020

Penyusun

H a r i r a h
90300115042



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Maros*", yang disusun oleh **HARIRAH**, NIM **90300115042**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2020 bertepatan dengan 01 Rajab 1441, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 03 Maret 2020
08 Rajab 1441

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., M.A.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hasbiullah, SE., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Maros “* meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V Penutup.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan baik berupa materi maupun nonmateri dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat dan membantu penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya untuk kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Sabang dan Ibunda Cendang yang telah memberikan kasih sayang yang tulus , doa dan semangat kepada penulis. Ucapan terima kasih untuk kakak-kakak perempuanku Syamsiah, Nursiah, Syahrana dan kakak iparku Nuswir dan Ismail yang yang selalu menyemangati saya dalam segala hal.

2. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasbiullah, SE., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta Bapak Alim Syariati., SE., M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I yang tidak pernah lelah dan bosan-bosannya membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran bagi penulis.
6. Bapak Mustafâ Umar, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II atas kesediaan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Hasbiullah, SE.,M.Si selaku penguji I dan ibu Siti Aisyah, S.Ag., M.Ag selaku penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan ditengah kesibukannya demi kesempurnaan tulisan ini.
8. Penguji Komprehensif yang telah mengajarkan saya arti kesabaran dan lebih menghargai waktu dan proses, serta pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja Dr. Hasbiullah, SE., M.Si, Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si, dan Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.
9. Para dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak membantu.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros dan seluruh staf yang bersangkutan yang telah

memberikan izin untuk pengambilan data guna melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini.

11. Terima kasih kepada teman seperjuangan di bangku perkuliahan, Ilmu Ekonomi A angkatan 2015 Restu Restia Ningsih, Hudria Husnul Khatimah, Amah, Nirwana, Rahmi, Nurliana, Yesi Tri Ulfa, Ica Trisnawati, Halimah Tussadih, Harlina dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih untuk teman-teman Silo Squad, Miss Rempeng dan kepompong yang juga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Terimakasih untuk semangat dan dukungannya teman-teman KKN Jombe Squad, Ina, Dani, Nano, Ayu, Dilla, Sri, Nadin, Lut, Kifli, Ahmed, Ruslan dan Kakak Ari.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan sumbangsi berupa dukungan semangat kepada penulis.

Segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah, pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dengan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada segenap pembaca. Semoga skripsi ini memberikan manfaat.

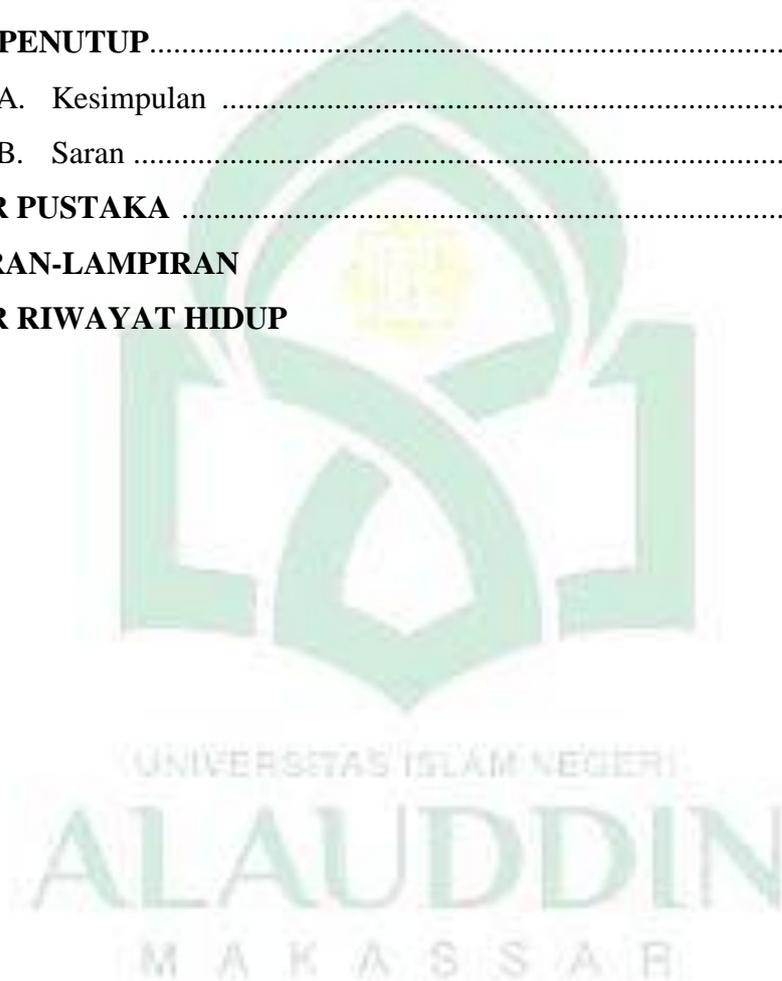
Samata, Februari 2020

H A R I R A H
NIM. 90300115042

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional Variabel	11
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	17
A. Grand Theory	17
B. Orientasi Pasar	21
C. Orientasi Kewirausahaan	23
D. Keunggulan Bersaing.....	25
E. Kinerja Keuangan	27
F. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	29
G. Kerangka Pikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Karakteristik Responden	42
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian	54
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.1	Rata-Rata Pendapatan UMKM	3
1.2	Devisi operasional Variabel	12
1.3	Penelitian Terdahulu.....	13
3.1	Instrumen Penelitian.....	36
4.1	Gambaran Responden Menurut Usia.....	42
4.2	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin.....	43
4.3	Gambaran Responden Menurut Lama Usaha.....	43
4.4	Karakteristik Responden Menurut Sumber Modal.....	44
4.5	AVE atau Average Variance Extracted.....	47
4.6	Fornell Larcker Criterion	49
4.7	Cronbach Alpha dan Composite Realibility	50
4.8	Ringkasan Hasil Measurement Models	50
4.9	Nilai R-Square	51
4.10	Hasil Uji Hipotesis	53



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	32
4.1	Model Struktural	52



DAFTAR GRAFIK

No.	Teks	Halaman
2.1	Grafik Perkembangan UMKM Aktif 2011-2017	44



ABSTRAK

N a m a : Harirah

N I M : 90300115042

Jurusan : Ilmu Ekonomi

J u d u l : Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maros

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab agar lebih memperhatikan masalah kemiskinan di Kabupaten Maros.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maros. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan Koefisien Deter-minasi (R^2) pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ dan t-tabel. Adapun variabel yang di-amati dalam penelitian ini adalah PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros dengan nilai masing-masing 0,012 untuk PDRB, 0,032 untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sementara Dana Desa dengan nilai 0,665 yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. sedangkan nilai Koefisien determinasi (R^2) adalah 0,998 atau 99,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PDRb, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa dalam menjelaskan kemiskinan adalah sebesar 99,8%.

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Kemiskinan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan tersebut (Arifin, 2009). Dengan adanya pembangunan di tiap daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Nuraini, 2017). Proses lajunya perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi PDRB pada suatu daerah maka semakin besar potensi sumber penerimaan dan apabila PDRB pada suatu daerah rendah maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Secara singkat, kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini

secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suliswanto, 2010). Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan sumber daya serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makan. Menurut BPS pula bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari.

Dalam perkembangannya, kemiskinan tidak lagi dimaknai sebatas ketidakmampuan ekonomi semata. Lebih dari itu, kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dalam kesehariannya dan adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan cara merendahkan martabatnya juga sudah bisa dikategorikan sebagai kemiskinan.

Dalam pandangan islam, kemiskinan sangat tidak disukai Allah. Bahkan Nabi Muhammad saw telah memperingatkan bahaya kefakiran yang dapat mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Kemiskinan membuat manusia tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban individu, sosial maupun moral. Karena itu Rasulullah saw mengajarkan manusia untuk berdoa agar diajuhkan dari kemiskinan. Islam juga tidak memandang kemiskinan sebagai masalah kultural karena Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mencari nafkah. Sebagaimana Firman Allah swt dalam ayat berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(Q.S Al-Mulk :67/15)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita (manusia) untuk mencari rezeki di segala penjuru bumi dan tetap berjalan di jalan-nya (Allah) karena Allah SWT telah menjadikan bumi tunduk dan patuh untuk dilewati, digali, ditanami dan di dirikan bangunan diatasnya. maka bersyukurlah atas nikmatnya karena kepadanya (Allah) kita akan kembali.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank, 2004*). Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum merupakan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan ke-

miskinan lebih berorientasi pada program sektoral. karena itu, di perlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan di Kabupaten Maros tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terdapat di pemerintahan pusat, yaitu tingginya angka kemiskinan. Akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Maros telah memfokuskan kegiatan ekonominya pada peningkatan Produk Domestik regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2014-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000 orang)	Persentase (%)
2014	286 937	40,13	11,93
2015	307 717	40,08	11,85
2016	336 579	39,02	11,41
2017	348 726	38,50	11,67
2018	376 749	35,97	11,72
2019	394 762	34,75	11,80

Sumber : BPS Kab Maros

Tabel 1.1 memperlihatkan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros. Tabel tersebut menjelaskan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros periode 2014-2018 dalam jumlah ribuan jiwa dan persentase. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros dari tahun 2014-2016 konsisten mengalami penurunan. Namun data 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dimana tahun 2017

jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 11,67 pesen di tahun 2018 sebesar 11,72 persen dan tahun 2019 sebesar 11,80 persen.

Tabel 1.2 PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dan Laju pertumbuhan ekonomi Kab Maros (%)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
2014	12,01	5,32
2015	8,44	5,32
2016	9,50	9,52
2017	6,81	6,81
2018	6,19	6,19
2019	6,82	6,82

Sumber : BPS Kab Maros 2019

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan tentang persentase laju PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Tabel tersebut menjelaskan laju PDRB dan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014 PDRB sebesar 12,01 persen, di tahun 2015 menurun sebesar 8,44 persen kemudian di tahun 2016 kembali meningkat sebesar 9,50 persen dan tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 6,81 persen pada tahun 2017 dan 6,19 persen pada tahun 2018 sementara pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi sebesar 6,82 persen. Begipun dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat di lihat pada tabel diatas, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun terakhir meningkat sebesar 6,82 persen sementara pertambahan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Maros juga bertambah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maros digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah lebih jelas. PDRB juga indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada

dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

Seperti halnya PDRB yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke perekonomian daerah yang lebih jelas maka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, antar desa dan kota, pemerintah pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan pedesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo, 2014 : 302-319).

Dalam meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut seperti adanya program Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Dana Desa (Abidin, 2015 : 61-76).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Tujuan penggunaan dana desa didalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menjangkau program-program Desa. Salah satu tujuan dari alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007). Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat

(Nurcholis, 2011 : 90). Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015 : 61-76).

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintah paling terdepan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia. Demikian pula halnya yang terjadi di Kabupaten Maros, bahkan jauh sebelum lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Hal tersebut sangat memberikan peluang bagi desa untuk mewujudkan otonomi desa. Namun kenyataannya desa belum mampu sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diharapkan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berkenaan dengan filosofi Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan ditugaskan pemerintah dan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah susai tugas.

Ditetapkan peraturan pemerintah Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang cara pengalokasian, penyuluan, penggunaan, pemantapan dan evaluasi Dana Desa, yang mengatur secara detail mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa untuk setiap desa. Sehingga pemerintah kabupaten/kota diharuskan untuk bisa membangun dan mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung jalannya pemerintah desa dan program dari pemerintah. Berikut adalah data Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros :

Tabel 1.3 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
2015	23,469,702,000	20,367,152,600
2016	52,689,400,931	51,279,977,710
2017	73,123,295,009	72,296,294,109
2018	74,083,395,000	84,948,368,900
2019	86,296,412,000	86,296,412,000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Maros

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (Astuti, 2012 : 19).

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya

akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi dimasyarakat pedesaan (Bank Dunia,2000). Badan Pusat Statistik (BPS), menjelaskan persentase kemiskinan pada tahun 2017 diperkotaan mencapai 1,26persen sementara persentase kemiskinan di desa sebesar 13,47persen, ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih banyak di pedesaan. Seperti halnya kemiskinan di Kabupaten Maros.

Dengan melihat sisi semua permasalahan maka program PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa merupakan program yang jika dijalankan dengan baik maka akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Tingkat Kemiskinan baik dari segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di setiap desa khususnya di Kabupaten Maros. Karena itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil pembangunan akan terlihat jelas dan juga sebaliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ***“Pengaruh PDRB, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Maros”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros?

2. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan dari penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Pajukukang kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam mengelola anggaran Dana Desa
2. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Landasan Teori*

1. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Produk Domestik Regional bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Robinson Tarigan, 2008), yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara bahan baku yang dipakai dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan /produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor. Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:

- (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya (BPS, 2012:28)
- (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (BPS, 2012:28)

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan Kuznet.

a) Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19-an, yaitu di masa revolusi Industri, dimana suasana waktu itu merupakan awal

bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

(1) Adam Smith

Orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790), dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu: a) Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah), b) Sumber daya insani (atau jumlah penduduk), dan c) Stok barang modal yang ada.

Menurut Adam Smith untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dimana akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Disamping itu Smith juga menitik beratkan pada "luas pasar". Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan

internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional ini menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Adam Smith, sekali pertumbuhan ini mulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

(2) David Ricardo

Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mazhab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817.

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan, yaitu: a) Teori tentang nilai dan harga barang,

b) Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, c) Teori tentang perdagangan internasional, dan d) Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu: a) Jumlah tanah terbatas, b) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah), c) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi, d) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu, dan e) Sektor pertanian dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk margin (marginal product) yang kita kenal dengan istilah *The law of diminishing return*. Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja

dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses ini akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Kemudian tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi, dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal.

b) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat mewarnai teori pertumbuhan neoklasik sehingga Robert Solow dianugerahi hadiah nobel bidang ekonomi pada tahun 1987. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan kemajuan tingkat teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi adalah sangat tinggi.

Teori pertumbuhan neoklasik menegaskan bahwa kondisi keter-belakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumberdaya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan. Model pertumbuhan neoklasik Solow berperan pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan jika keduanya dianalisis secara sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap (*constand return to scale*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh solow maupun para teoritis lainnya diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Model pertumbuhan neoklasik Solow ini menggunakan fungsi produksi agregat standar, yakni:

$$Y = A.F (K,L)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga pertumbuhan total faktor produktivitas. Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (malalui

pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi, lebih lanjut dikemukakan bahwa perekonomian tertutup (*closed economy*), yakni yang tidak menjalin hubungan dengan pihak luar, yang tingkat tabungan rendah, maka ceteris paribus perekonomian ini dalam jangka pendek pasti mengalami laju pertumbuhan lebih lambat apabila dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan konvergensi penurunan pendapatan per kapita. Di lain pihak, perekonomian terbuka (*open economy*), yakni yang mengandalkan hubungan perdagangan dengan pihak lain pasti akan mengalami konvergensi peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dimana rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjanjikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi.

c) Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznet menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan kapasitas produksi didasarkan pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi/kelembagaan, sikap dan ideologi.

Terdapat enam karakteristik yang ditemui pada hampir semua negara maju, yaitu: (1) pertumbuhan output per kapita yang tinggi; (2) kenaikan tingkat produktivitas faktor produksi yang tinggi; (3) transformasi struktur ekonomi yang cepat; (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) terdapat kecenderungan negara maju untuk memperluas pasar dan sumber

bahan baku pada negara lain (penetrasi ekonomi); (6) penyebaran pertumbuhan ekonomi yang terbatas, hanya mencapai sekitar 1/3 penduduk dunia.

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideology yang dibutuhkan.” Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya: (1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi; (2) Ke-majuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang ber-kesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk menetralsir potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru; dan (3) Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideology harus dilakukan Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi social ibarat bola lampu tanpa aliran listrik.

2. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di peruntukan bagi desa di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa, yang dibuktikan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah ± Rp 20,7 triliun, dalam APBN 2015 yang telah disalurkan ke 74,093 desa di seluruh Indonesia (Abidin, 2015 : 61-76).

Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Adapun tujuan Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain

- 1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit.
- 2) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru
- 3) Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan, serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.
- 4) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri
- 5) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Manfaat Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu :

a. Pengentasan Kemiskinan

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari segi kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya dana desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan.

b. Dana Desa untuk pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus meningkat setiap tahunnya.

c. Dana Desa untuk menahan laju Urbanisasi

Dana desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak berurbanisasi.

Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan menggunakan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Perpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang mengalir ke desa dengan

menggunakan mekanisme ADD. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015 : 61-76).

Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011 : 90).

4. Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: a) terpenuhinya kebutuhan pangan, b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan, c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri

dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Adam Smith (Pramitha dkk., 2015 : 106-124) kemiskinan tidak hanya sebatas kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok semata melainkan juga karena ketidakmampuan dalam menegakkan HAM dan ketidakmampuan dalam memperoleh pendidikan. Sama halnya dengan Adam Smith, Shaughnessy (2014) menyatakan bahwa anak-anak dari masyarakat miskin memiliki masalah pada perkembangannya, kesehatan mental dan memiliki pendidikan yang lebih rendah dari anak-anak lainnya. Berdasarkan UNDP dalam Iaporan *Human Development Report 1997* ukuran kemiskinan disebut dengan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index-HPI*). Kemiskinan dapat diukur dengan tiga hal utama yaitu kehidupan, pendidikan dasar, serta keseluruhan ketetapan ekonomi. Salah satu teori kemiskinan yaitu teori demokrasi sosial, dimana kemiskinan bukanlah masalah individu melainkan masalah struktural.

Rudolf S. Sinaga dan Benyamin dalam Cahyono dalam Akhmad Daerobi, dkk (2007:5) memberikan pengertian kemiskinan melalui pembedaan kemiskinan menjadi dua jenis yaitu: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh sumber daya yang terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Dengan kata lain ketidakmampuan seseorang atau komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan teknologi menjadi penyebab. Sementara itu kemiskinan buatan didefinisikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan yang ada dalam masyarakat membuat masyarakat sendiri tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dalam beberapa

definisi lainnya, kemiskinan buatan juga disebut lebih populer dengan sebutan kemiskinan struktural.

a) Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, ke-mampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama*, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. *Kedua*, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya fikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. *Ketiga*, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin mem-

perburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. *Keempat*, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. *Kelima*, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak-berhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

Sharp, et.al., mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di-pandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

b) Teori Kemiskinan

Teori-teori yang digunakan seperti Emil Salim (1982, dalam Togar Saragih, 2006: 5-6) mengemukakan bahwa ciri-ciri orang miskin adalah: (1) Umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan terbatas; (2) Tidak mempunyai kemungkinan

untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha, disamping itu tidak sepenuhnya syarat untuk mendapat kredit perbankan, menyebabkan mereka berpaling ke rentenir; dan (3) Tidak memiliki tanah, jika adapun relative kecil. Umumnya jadi buruh tani, atau pekerja kasar diluar pertanian. Pekerjaan pertanian bersifat musiman menyebabkan kesinambungan kerja kurang terjamin. Mereka umumnya sebagai pekerja bebas, akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar tingkat upah menjadi rendah dan mendukung atau mempertahankan mereka untuk selalu hidup dalam kemiskinan.

Menurut Thorbecke, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh dipertanian dibandingkan dengan pedesaan karena, Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama diwilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; Kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan oleh SMERU *Research Institute* memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang keberlanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.

Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara-negara sedang berkembang merupakan “*vicious cycle*”(lingkaran yang tidak berujung pangkal). Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil.

Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah, dan mengakibatkan rendahnya pembentukan modal.

Menurut Nurkse dalam Togar Saragih (2006:7) ada dua lingkaran pe-rangkap kemiskinan yaitu: (1) Dari segi *supply*: tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah me-nyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi), yang kemudian akan menyebabkan kekurangan modal dan demikian tingkat produktifitasnya rendah; (2) Dari segi *demand*: di Negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat sangat rendah tersebut dikarenakan tingkat produktifitas yang rendah sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu, disebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal dan seterusnya.

c) Ukuran Kemiskinan

Menurut William A. (2001:377) kemiskinan adalah konsep yang relatif, bagaimana cara kita mengukurnya secara obyektif dan bagaimana cara kita memastikan bahwa ukuran kita dapat diterapkan dengan tingkat relevansi yang sama dari waktu ke waktu.

Mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang diperkenalkan dalam Foster dkk (dalam Tambunan 2003:96) yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. *Pertama, the incidence of poverty*: persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per

kapita di bawah garis kemiskinan. *Kedua, the depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. *Ketiga, the severity of poverty* diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK).

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang bisa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

- (1) Kemiskinan Absolut. Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan (Todaro, 1997 dalam Lincolin Arsyad 2004:238). Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan

istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

- (2) Kemiskinan Relatif. Miller dalam Lincolin Arsyad (2004:239) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak di tentukan oleh keadaan sekitarnya daripada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

d) Kriteria Kemiskinan

BAPPENAS memberikan rumusan yang konkrit sebagai indikator utama kemiskinan adalah:

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
- 2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
- 3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;

- 4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
- 5) Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;
- 6) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
- 7) Terbatasnya akses terhadap air bersih;
- 8) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
- 9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
- 10) Lemahnya jaminan rasa aman;
- 11) Lemahnya partisipasi
- 12) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
- 13) Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Sedangkan menurut BPS ada 14 kriteria penduduk miskin di Indonesia: 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang; 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6) Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi; 7) Kemampuan membeli pakaian minimal 1 set dalam setahun tidak ada; dan 8) Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 320.000,-.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

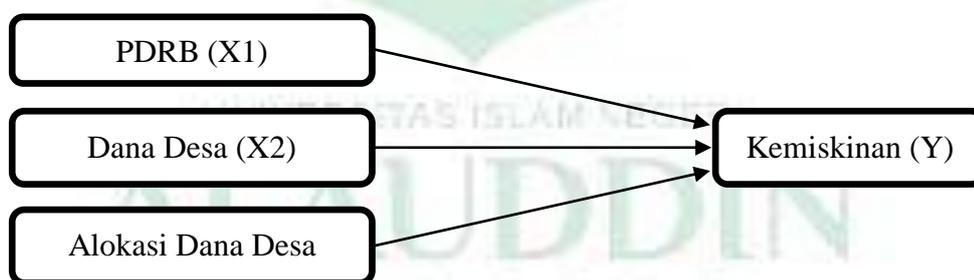
No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nilam Indah Susilowati (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur	Variabel Terikat: kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Variabel Bebas: Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB	berdasarkan hasil penelitian yg telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal & PDRB ber-pengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota dengan nilai masing-masing -3,59 untuk ADD, 2,87 untuk Dana Desa, -6,05 untuk Belanja Modal, dan -3,57 untuk PDRB.
2	Intan Mala Sari (2017)	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung	Variabel terikat: Kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung Variabel bebas: DD, Alokasi DD & Kemiskinan Desa	Berdasarkan hasil penelitian yg telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan desa dgn nilai masing ² -4,52 untuk Dana Desa dan -1,52 untuk ADD.
3	Ratna Sari Dewi (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara	variabel terikat: kemiskinan di Prov. Sumatera Utara variabel Bebas: Alokasi Dana Desa, dan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan. Kesimpulan hasil penelitian atas Alokasi Dana Desa ini adalah merupakan salah satu pendapatan desa yg memiliki pengaruh dalam mngentaskan kemiskinan di pemerintah desa
4	Muhammad Fajar Gumilang (2017)	Analisis dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bogor	Variabel terikat: Kemiskinan di Kab. Bogor Variabel bebas: Alokasi DD, Kemiskinan & pembangunan Desa	Penelitian ini menu jukka bahwa ADD perkapita, IPM, PDRB sektor industri ber-pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan
5	Sulton Malik Al Ghozali (2019)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Variabel terikat: kemiskinan dikecamatan Sendang Agung Variabel bebas: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Kemiskinan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain laju PDRB, Dana Desa, Alokasi Dana Desa. PDRB sebagai indikator pertumbuhan di Kabupaten Maros. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk menunjukkan kualitas pembangunan Infrastruktur maupun kualitas kesejahteraan masyarakat.

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan direges untuk mendapatkan tingkat signifikan setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Kabupaten Maros untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai tafsiran yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang akan diuji kebenarannya (M. Nazir, 1998). Setelah adanya kerangka pemikiran sebelumnya, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis secara parsial dan simultan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa variabel PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros
2. Diduga bahwa variabel Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros
3. Diduga bahwa variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel bebas yakni PDRB, Dana Desa, Alokasi Dana Desa terhadap variabel terikat yaitu: tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros.

B. *Jenis dan Sumber Data*

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data *time series* (data berkala) dengan jangka waktu 2014-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kabupaten Maros dan Portal Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Sumber data diperoleh dari data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dalam beberapa terbitan.

- 2) Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: 1) Data kemiskinan di Kabupaten Maros, 2) Data PDRB di Kabupaten Maros, 3) Data Dana Desa di Kabupaten Maros, dan 4) Data Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan PDRB, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan. Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan ornam). Untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka dan internet.

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif.

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Analisis Regresi Berganda.

Analisis regresi berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependen variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen variabel). Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros yang dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = f(\text{PDRB, Dana Desa, Alokasi Dana Desa})$$

Kemudian fungsional tersebut ditransformasikan menjadi model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

X_1 = PDRB

X_2 = Dana Desa

X_3 = Alokasi Dana Desa

e = error

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat

yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

a) Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dalam penelitian. Bila terdapat hubungan antar variabel maka terdapat permasalahan yang disebut multikolinieritas. Multikolinearitas tidak akan terjadi pada model yang sederhana (terdapat satu dependen dan variabel independen). Model yang baik seharusnya multikolinearitas tidak serius terjadi. Indikasi bahwa model tersebut terdapat multikolinearitas adalah

R^2 yang tinggi namun secara individu banyak variabel independen tidak signifikan (Ghozali, 2005).

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1997). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch-Godfrey (*BG Test*). Kemudian dilakukan pengujian dalam hipotesa sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$, tidak ada masalah autokorelasi

$H_a: \rho \neq 0$, ada masalah autokorelasi

Selanjutnya nilai chi square hitung (nilai *Obs*R-squared*) dibandingkan dengan α (0,05). Dimana α (0,05) adalah kritis *chi square* yang ada dalam table statistik *chi square*. Jika *chi square* hitung (nilai *Obs*R-square*) lebih

besar dari *chi square*, maka terdapat masalah autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

d) Uji Heterokedasitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

4. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

a) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t

tabel maka berarti t_{hitung} tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2006).

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh PDRB, Dana Desa, Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Untuk lebih memudahkan pembahasan maka penulis membatasi variabel sebagai berikut:

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah PDRB (X_1), Dana Desa (X_2), dan Alokasi Dana Desa (X_3). Berikut adalah definisi operasional variabel pada penelitian ini:

1. Kemiskinan (Y)

Keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.

2. PDRB (X_1)

Jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

3. Dana Desa (X_2)

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD guna untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Alokasi Dana Desa (X_3)

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum*

1. **Kondisi Geografis**

Luas Wilayah Kabupaten Maros 1619,11 KM² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah leseng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan topografinya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit., serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan dan tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

2. Data Kependudukan

Jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2018 data BPS Kabupaten Maros adalah 349.822 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 171.117 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 178.705 jiwa. Berdasarkan dengan jumlah rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Maros di tahun 2018 berkisar 95,75.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, penduduk perempuan lebih banyak karena diduga salah satu penyebabnya adalah penduduk laki-laki banyak yang bekerja untuk mencari nafkah dan menetap diluar daerah, misalnya kota Makassar dan sekitarnya.

Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio), perempuan 2lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Namun di Kecamatan tanranlili, rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100, hal ini

menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.504 jiwa. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 49 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros dirinci dalam tiap Kecamatan tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Mandai	19.318	20.687	40.005
2	Moncongloe	9.320	10.017	19.337
3	Maros Baru	12.949	13.495	26.444
4	Marusu	13.651	13.880	27.531
5	Turikale	21.791	23.237	45.028
6	Lau	13.049	13.631	26.680
7	Bontoa	14.044	14.471	28.515
8	Bantimurung	14.720	15.548	30.268
9	Simbang	11.614	12.405	24.019
10	Tanralili	13.498	13.015	26.513
11	Tompobulu	7.637	7.870	15.507
12	Camba	6.606	6.850	13.456
13	Cenrana	7.290	7.566	14.856
14	Mallawa	5.630	6.033	11.663
Jumlah		171.117	178.705	349.822

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2019

3. Iklim

Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 26,9° tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 22,4°C (terjadi pada bulan Agustus) sedangkan paling tinggi adalah 33,4°C (terjadi pada bulan Oktober).

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 237 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 187

hari selama Tahun 2012, dengan rata-rata suhu udara minimum 23,9°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,4°C.

Penyinaran matahari selama tahun 2011 rata-rata berkisar 67%. Secara geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/ bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran.

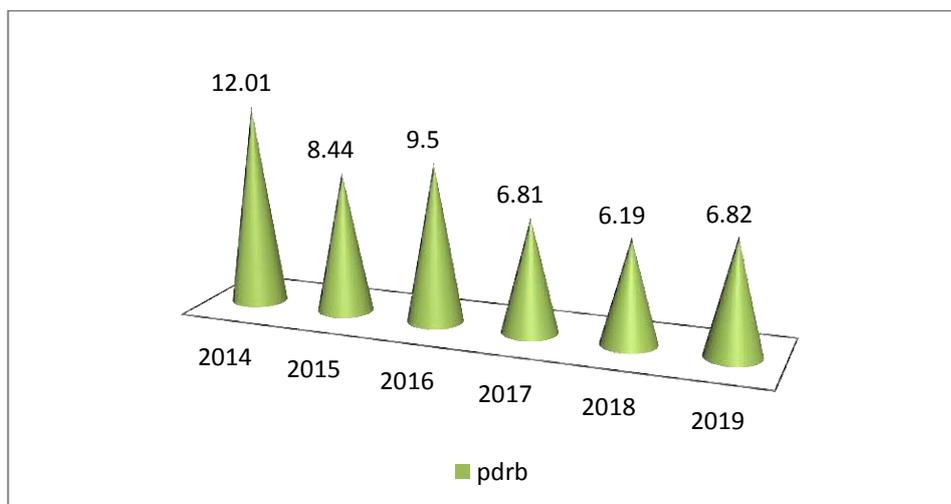
B. Deskripsi Umum Antar Variabel

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat digambarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen atau variabel Y dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang di pengaruhi oleh variabel independen atau variabel X yaitu PDRB, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Karena itu, dapat kita gunakan ada beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha ekonomi dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Unit ekonomi yang dimaksud mencakup kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Semakin tinggi produk domestik regional bruto maka semakin tinggi kemajuan perekonomian suatu daerah yang mana dalam hal ini mempengaruhi kemiskinan. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui

potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut data PDRB atas harga konstan 2000 di Kabupaten Maros :



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019, data diolah

2. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah yang diberikan kepada pemerintah pusat (Gubernur), kemudian disalurkan kepada Kabupaten/kota dan selanjutnya diteruskan ke Kecamatan, lalu pemerintah atau aparat kecamatan memberikan langsung kepada kepala Desa.

Dalam kondisi setiap daerah aspek penting lainnya yang juga harus dibahas dalam kondisi umum Desa yaitu sumber daya manusia., pengelolaan dana desa serta pembangunan infrastruktur Desa. Alasannya jelas karena sumber daya manusia merupakan alternatif terakhir yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat tentang kondisi pembangunan Desa, misalnya untuk pembangunan ekonomi,

kondisi umum desa, dari dua aspek tersebut dapat di ketahui dengan tiga aspek utama yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan potensi ekonomi.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan kebalikan dari dana desa yang mana dana yang diperoleh berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang dimana dananya di salurkan dari pemerintah daerah seperti (Bupati), kemudian disalurkan ke kecamatan daerah, apabila dana tersebut telah sampai ke paada pemerintah kecamatan maka di berikan langsung kepada pemerintah desa masing-masing.

Alokasi dana desa juga merupakan bagaian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh daerah/kabupaten utuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya utuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus.

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural , dan struktural. Kemiskinan natural di sebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural di sebabkan secara langsung maupun secara tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umunnya dapat dikenali dari transpormasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak di sebabkan sikap individu dalam

masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Oleh karena itu seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya tidak memungkinkan seseorang tersebut untuk menaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya. Berikut persentase kemiskinan Kabupaten Maros:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2019

Dari gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014 kemiskinan mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 11,93, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,85, dan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan kembali menurun, namun pada tahun 2017 hingga 2019 kemiskinan kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 11,80.

C. Hasil Pengolahan Data

1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen (Kemiskinan) dan variabel independen (PDRB, dana

desa, dan alokasi dana desa). Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficient berdasarkan output SPSS terhadap ketiga variabel independen yaitu PDRB, Dana Desa, alokasi dana desa terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan di Kabupaten Maros yang ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,790	,058		151,130	,004
PDRB	,307	,006	2,521	51,178	,012
Dana_Desa	,000	,001	,064	,581	,665
Alokasi_Dana_Desa	-,015	,001	-2,407	-19,575	,032

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2019

Hasil dari persamaan regresi berganda diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- Nilai koefisien kemiskinan sebesar 8.790, angka tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB (X1), Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3), nilainya 0 atau konstan maka kemiskinan di Kabupaten Maros sebesar 8.790.
- Variabel bebas PDRB (X1) mempunyai koefisien sebesar 0.307, angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PDRB berpengaruh positive (+). Artinya apabila PDRB bertambah 1 tahun maka akan menyebabkan penambahan kemiskinan sebesar 307 jiwa dengan asumsi dana desa (X2) dan alokasi dana desa (X3) dianggap konstan.

- Variabel bebas Dana Desa (X2) mempunyai koefisien sebesar 0.000, angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa berpengaruh negative (-), artinya apabila dana desa bertambah 1% maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0.000 jiwa dengan asumsi PDRB (x1) dan alokasi dana desa (x3) dianggap konstan.
- Variabel bebas Alokasi Dana Desa (X3) mempunyai koefisien sebesar -0.015, angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh alokasi dana desa berpengaruh negative (-). Artinya apabila alokasi dana desa bertambah 1 tahun maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0.015 jiwa dengan asumsi PDRB (X1) dan Dana Desa (X2) dianggap konstan.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

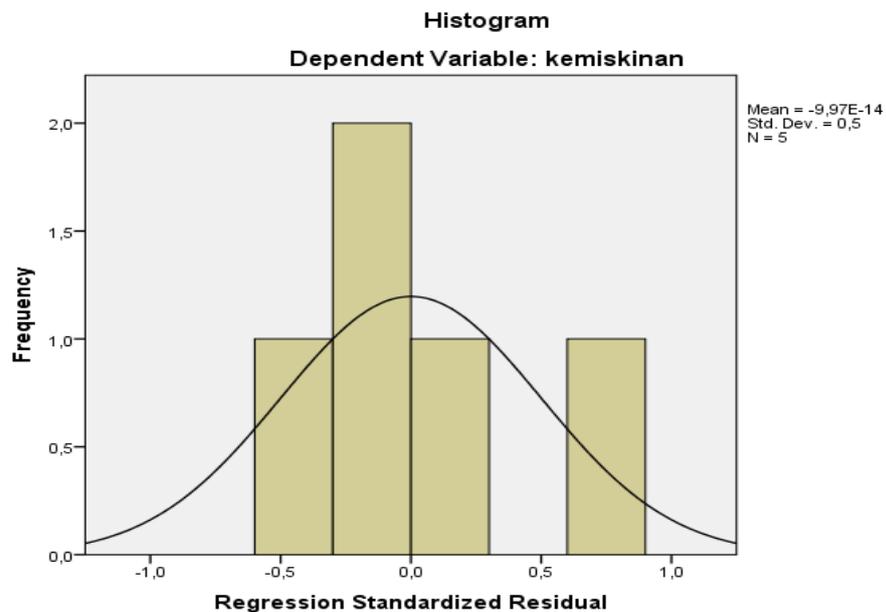
Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi didalam analisis regresi linear berganda. Hal ini dikarenakan karena hasil regresi harus di uji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada beberapa bagian antara lain:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel berikatan dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik. Baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *normal probability plot*. Normalitas

dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya.

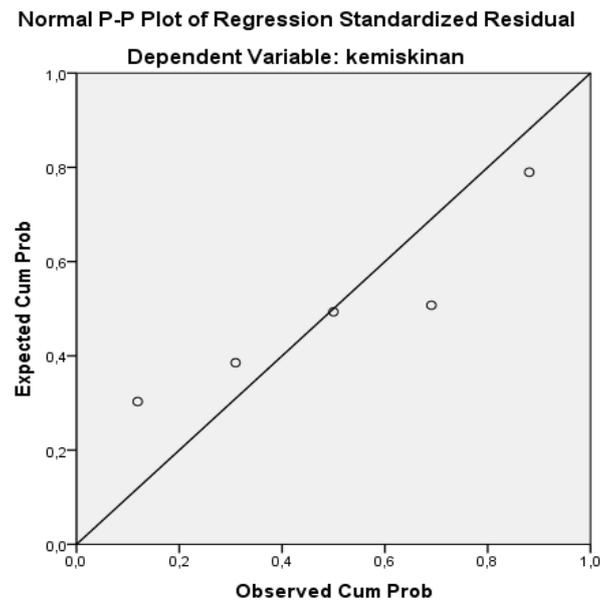
Uji normalitas dengan grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya yang akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas yang pertama dengan melihat grafik secara histogram dan grafik normal P-Plot sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 dan 1.2.



Gambar 1.1 : Grafik Histogram

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2019

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya.



Gambar 1.2 : grafik Normal P-Plot

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2019

Gambar 1.2 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 1.2 Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

b) Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berdasarkan aturan *variance inflation faktor* (VIF) dan Tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau Tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala Multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PDRB	,156	6,412
Dana Desa	,231	2,045
Alokasi Dana Desa	,525	9,937

a. Dependen Variabel: Kemiskinan

sumber : *Output SPSS 21 data diolah, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

- Nilai VIF untuk variabel PDRB sebesar $6.412 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0.156 > 0,10$ sehingga variabel PDRB dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas
- Nilai VIF untuk Dana Desa sebesar $2.045 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0.231 > 0,10$ sehingga variabel Dana Desa dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas
- Nilai VIF untuk variabel Alokasi Dana Desa sebesar $9.937 < 10$ dan nilai tolerance sebesar $0.525 > 0,10$ sehingga variabel Alokasi Dana Desa dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas

c) Uji Autokorelasi

Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Jika nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari jumlah variabel independen, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	1,000	,998		,00667	2,183

a. Predictors: (Constant), Alokasi_Dana_Desa, PDRB, Dana_Desa

b. Dependent Variable: kemiskinan

Sumber : output SPSS 21. Data diolah, Tahun 2019

Berdasarkan klasifikasi nilai DW (Durbin Watson) yaitu $\alpha=5\%$, $k=3$ $n=5$, maka diperoleh:

$dL : 0.3674$

$Du : 2.2866$

Berdasarkan tabel 1.3 nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 2.183, nilai dL sebesar 0.3674 dan nilai Du sebesar 2.2866 maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

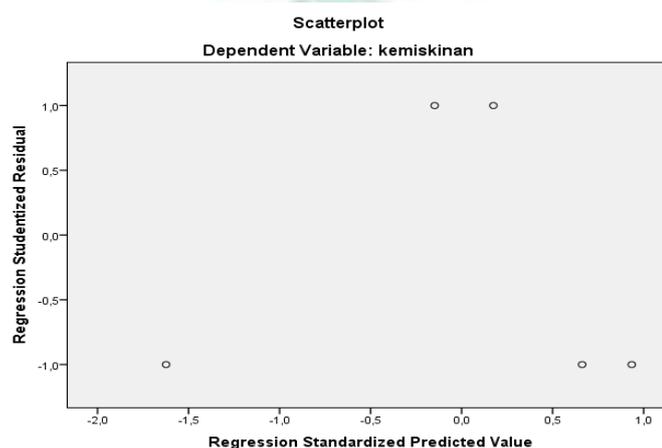
Grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi dan sumbu x adalah residual (y prediksi – y sesungguhnya) yang telah di studentized. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil gambar uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 21, dapat dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3 : Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2019

Berdasarkan gambar 1.3 Scatterplot tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi layak pakai untuk memprediksi pengaruh variabel berdasarkan masukan variabel independennya.

5. Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Deeterminasi (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan

sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Berikut hasil output uji koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 1.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R-squared
0.998

Sumber : Output SPSS 21 Data diolah, 2019

Menentukan nilai koefisien determinasi bisa diukur dengan nilai *R-square* atau *Adjusted R-Square* yang akan digunakan pada saat variabel independen hanya satu saja (biasa dibidang dengan Regresi Linier Sederhana). Sedangkan *Adjusted R-Square* dipakai pada saat variabel bebas lebih dari satu.

Nilai *Adjusted R-Square* pada Tabel di atas nilainya sebesar 0.998% yang artinya bahwa proporsi pengaruh variabel PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap variabel kemiskinan sebesar 99,8%. Artinya, pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan senilai 99,8% sedangkan selebihnya 02% (100%-99,8%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model regresi, yang artinya bahwa setiap hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki hubungan sebesar 99,8%.

b) Uji F Statistika

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai taraf signifikan $F_{hitung} < \alpha = 0.05$ juga dibuktikan dengan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Jika nilai signifikan F_{hitung} dibawah $\alpha = 0.05$ dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

maka variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 1.5 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,117	3	,039	880,210	,025 ^b
Residual	,000	1	,000		
Total	,117	4			

Sumber: Output SPSS 21 data di olah Tahun2019

Dari hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 1.5, pengaruh variabel PDRB (X1), Dana Desa (X2), dan Alokasi Dana Desa (X3), terhadap kemiskinan (Y), maka diperoleh nilai signifikannya $0.025 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c) Uji Statistik T

Hasil Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa) secara parsial terhadap variabel dependen (Kemiskinan) dan menganggap variabel lain konstan. signifikannya tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai T_{tabel} dengan T_{hitung} .

Berdasarkan tabel 1.6 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variabel dependen (PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa) secara parsial; terhadap variabel dependennya (kemiskinan) di Kabupaten Maros dapat dianalisis sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,790	,058		151,130	,004
PDRB	,307	,006	2,521	51,178	,012
Dana_Desa	,000	,001	,064	,581	,665
Alokasi_Dana_Desa	-,015	,001	-2,407	-19,575	,032

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2019

Dari hasil regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel PDRB (X1) didapatkan nilai koefisien sebesar 0.307 dan nilai signifikan sebesar 0.012, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) menyatakan variabel PDRB berpengaruh positive dan signifikan.
2. Dana desa (X2) didapatkan nilai koefisien sebesar 0.000 dan nilai signifikan sebesar 0,665, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari *level of significance* ($\alpha = 0,05$) sehingga variabel dana desa berpengaruh positive namun tidak signifikan.
3. Alokasi dana desa (X3) di dapatkan nilai koefisien sebesar -0.015 dan nilai signifikan sebesar 0,032, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari *level of signifance* ($\alpha = 0,05$) sehingga variabel alokasi dana desa berpengaruh negative namun signifikan.

D. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kabupaten Maros

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh dari nilai signifikan T_{hitung} dari variabel bebas yaitu PDRB sebesar 0.012, dimana nilai signifikan lebih kecil dari tingkat alpha (0,05) dan nilai coefficient sebesar 0.307, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa apabila PDRB naik sebesar 1 persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,307 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dio Syahrullah yang berjudul “ Analisis pengaruh Produk domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2009-2012” di mana variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S. Dan Dwi W. (2008) mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan jumlah kemiskinan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan kemiskinan di Kabupaten Maros adalah benar dan terbukti.

2. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Maros

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Dana Desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh dari nilai signifikan T_{hitung} dari variabel bebas yaitu dana desa sebesar 0.665 dengan nilai coefficient sebesar 0.000 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak karena tingkat signifikan lebih besar dari tingkat alpha (0,05). Yang artinya tidak ada pengaruh dana desa terhadap kemiskinan, tanda positif menunjukkan bahwa peningkatan dana desa akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Maros. Hal ini karena dalam penggunaan dana desa sebagian besar digunakan pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan. Sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Susilowati, dan Syamsul Hadi yang berjudul "pengaruh alokasi dana desa, dana desa, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur" di mana variabel dana desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga pengaruh dana desa tidak sesuai dengan hipotesis peneliti.

3. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan tingkat signifikan sebesar 0.032 dan coefficient sebesar -0.015

sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, karena tingkat signifikan lebih kecil dari tingkat alpha (0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. Hal ini memberikan indikasi jika setiap penambahan 1% alokasi dana desa, maka akan menurunkan kemiskinan desa sebesar -0,015. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah dengan judul “analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Tulungagung” di mana variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Karena penambahan jumlah alokasi dana desa dari tahun ke tahun dapat menciptakan tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang baik, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mengurangi kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros. berdasarkan hasil data regresi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros hal ini ditandai dengan nilai signifikan (0,012). Dengan nilai koefisien (0,307) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen pada PDRB, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,307 persen dengan asumsi variabel lain tetap, atau ringkasnya apabila PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun.
2. Dana Desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros hal ini ditandai dengan nilai signifikan (0,665). Dengan nilai koefisien (0,000) yang berarti bahwa setiap kenaikan Dana Desa tidak mempengaruhi kemiskinan. Hal ini karena dana desa di Kabupaten Maros lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur saja sehingga tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segi perekonomian.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros hal ini ditandai dengan nilai signifikan (0,032). Dengan nilai koefisien negatif (-0,015) yang berarti bahwa setiap

kenaikan satu persen pada ADD, maka kemiskinan akan turun sebesar 0,015 persen dengan asumsi variabel lain tetap, atau ringkasnya apabila Alokasi Dana Desa meningkat maka kemiskinan akan menurun.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih dari 6 tahun data time series sehingga lebih mudah melihat pengaruhnya
2. Dari hasil regresi linear berganda, terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Maros yakni variabel dana desa sehingga hal ini menjadi masalah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Maros. diharapkan, pemerintah Kabupaten Maros lebih berkonsentrasi terhadap penyaluran dana desa yang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur sementara tidak memperhatikan ekonomi masyarakat di Kabupaten Maros
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lainnya agar lebih mengetahui faktor lainnya yang mempengaruhi Kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2009). Analisis pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
- Astuti, P. B. 2012. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Jurnal Administrasi Publik*, 19.
- Abidin, Muhammad Zainul.**2015. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No.1 hlm 61-76.
- Azwardi & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No.(1), hlm: 29-41.
- BPS Kabupaten Maros. 2015. Maros Dalam Angka 2015
- BPS Kabupaten Maros. 2016. Maros Dalam Angka 2016
- BPS Kabupaten Maros. 2017. Maros Dalam Angka 2017
- BPS Kabupaten Maros. 2018. Maros Dalam Angka 2018
- BPS Kabupaten Maros. 2019. Maros Dalam Angka 2019.
- Dana, P., Dan, D., Dana, A., Lalira, D., Nakoko, A. T., Rorong, I. P. F., ... Ratulangi, U. S. (2018). *Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. 18(04), 62–72.
- Dian Octaviani, 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi, Hal. 100118, Vol.7, N0.8.
- Hadi Sasana. 2006, *Analisis Dampak transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab/Kota di Provinsi Jateng Dalam Pelaksanaan desentralisasi Fiskal*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, Hal. 223-242

<https://jojonomic.com/blog/produk-domestik-regional-bruto/>

<http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2014/04/produk-domestik-regional-bruto-pdrb.html?m=1>

<http://www.wartaekonomi.co.id>

Intan Mala Sari dan M Faisal Abdullah, 2017. *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung.* Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta

Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur, 79–93.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Erlangga.

Prasetyo, Yudhi dan Gregorius Nasiansenus Masjojo. 2014. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.* Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No.6, hlm 302-319.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa.

Pramitha, Murjana Yasa dan Marhaeni. 2015. Peranan Dana Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah di Kabupaten Buleleng. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana*, 4.02, hal. 106-124, ISSN:2337-3067.

Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.

Syahrullah Dio. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2011. *Skripsi.*

Saragih, Togar. *Pengangguran, Pendidikan dan Kemiskinan di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Teleskop STIE Y.A.I Volume 5 edisi 9. 2006.

Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting.* Jakarta: Galia Indonesia. 2003.

Todaro, Michael P, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedua, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

L

A

M

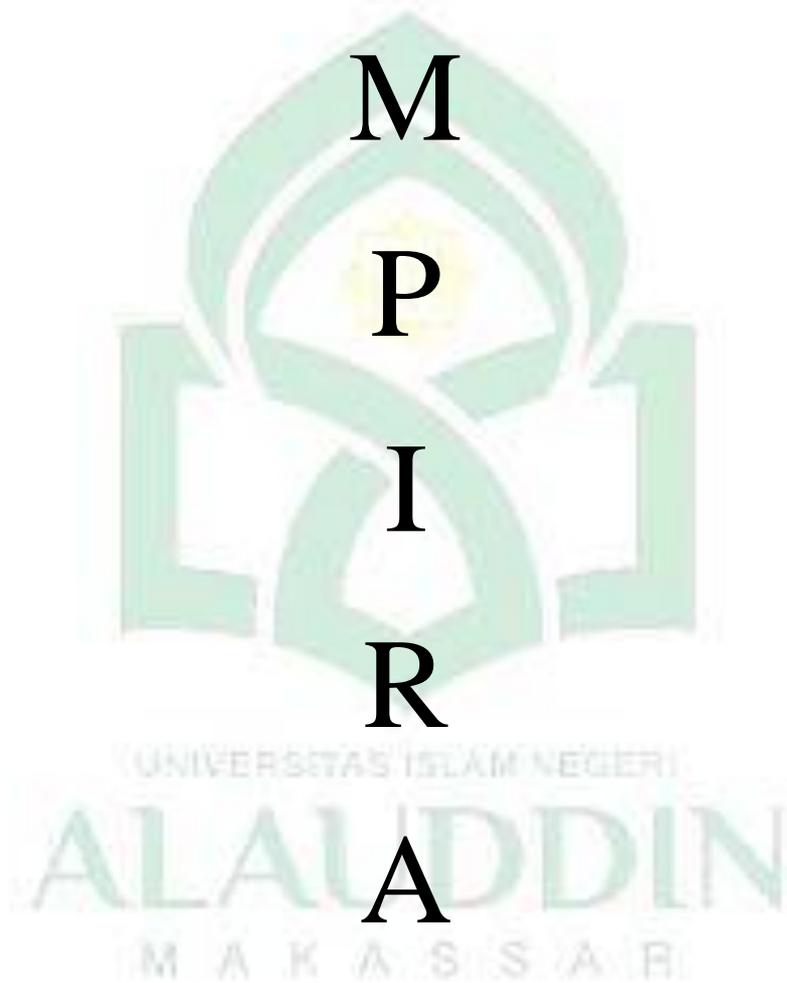
P

I

R

A

N



Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kemiskinan	11,6900	,17132	5
PDRB	12,4080	1,40848	5
Dana_Desa	61,9260	24,65640	5
Alokasi_Dana_Desa	62,9580	27,82389	5

Correlations

		kemiskinan	PDRB	Dana_Desa	Alokasi_Dana_Desa
Pearson Correlation	kemiskinan	1,000	,369	-,044	-,029
	PDRB	,369	1,000	,897	,918
	Dana_Desa	-,044	,897	1,000	,984
	Alokasi_Dana_Desa	-,029	,918	,984	1,000
Sig. (1-tailed)	kemiskinan	.	,270	,472	,481
	PDRB	,270	.	,020	,014
	Dana_Desa	,472	,020	.	,001
	Alokasi_Dana_Desa	,481	,014	,001	.
N	kemiskinan	5	5	5	5
	PDRB	5	5	5	5
	Dana_Desa	5	5	5	5
	Alokasi_Dana_Desa	5	5	5	5

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Alokasi_Dana_Desa, PDRB, Dana_Desa ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kemiskinan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	1,000	,998	,00667	2,183

a. Predictors: (Constant), Alokasi_Dana_Desa, PDRB, Dana_Desa

b. Dependent Variable: kemiskinan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,117	3	,039	880,210	,025 ^b
	Residual	,000	1	,000		
	Total	,117	4			

a. Dependent Variable: kemiskinan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,790	,058		151,130	,004		
	PDRB	,307	,006	2,521	51,178	,012	,156	6,412
	Dana_Desa	,000	,001	,064	,581	,665	,031	32,045
	Alokasi_Dana_Desa	-,015	,001	-2,407	-19,575	,032	,025	39,937

a. Dependent Variable: kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Alokasi_Dana_Desa, PDRB, Dana_Desa

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PDRB	Dana_Desa	Alokasi_Dana_Desa
1	1	3,896	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,101	6,205	,01	,00	,01	,01
	3	,002	42,496	,04	,08	,85	,53
	4	,001	65,925	,95	,92	,14	,46

a. Dependent Variable: kemiskinan

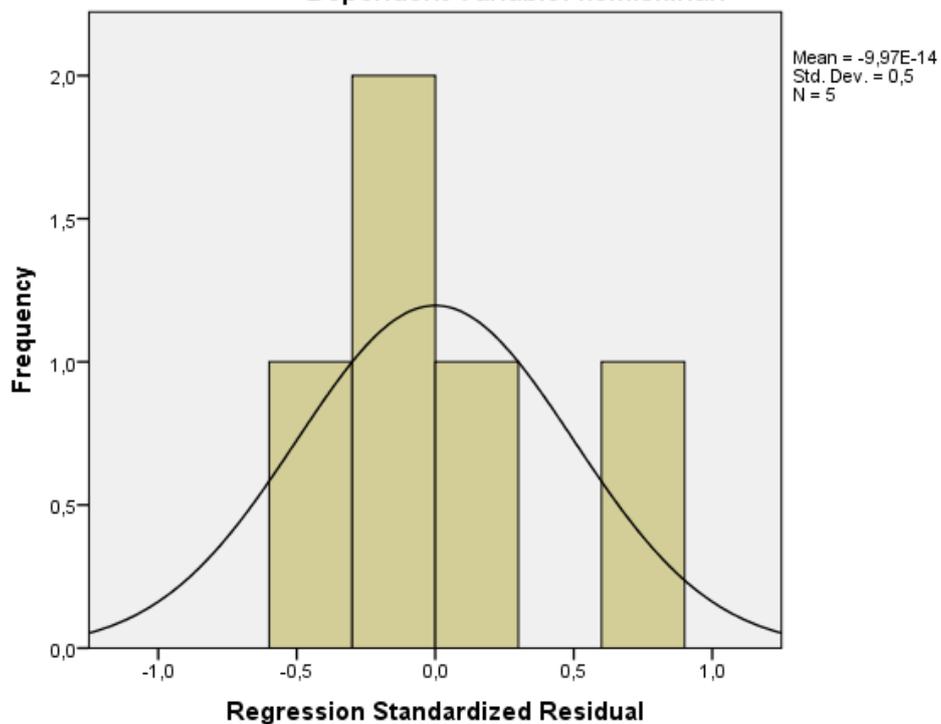
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	11,4119	11,8501	11,6900	,17129	5
Std. Predicted Value	-1,623	,935	,000	1,000	5
Standard Error of Predicted Value	,004	,007	,006	,001	5
Adjusted Predicted Value	11,3587	12,2542	11,7041	,35676	5
Residual	-,00344	,00537	,00000	,00333	5
Std. Residual	-,516	,805	,000	,500	5
Stud. Residual	-1,000	1,000	-,200	1,095	5
Deleted Residual	-,40424	,36126	-,01410	,27096	5
Stud. Deleted Residual	0
Mahal. Distance	,606	3,199	2,400	1,093	5
Cook's Distance	,136	918,964	331,273	456,721	5
Centered Leverage Value	,152	,800	,600	,273	5

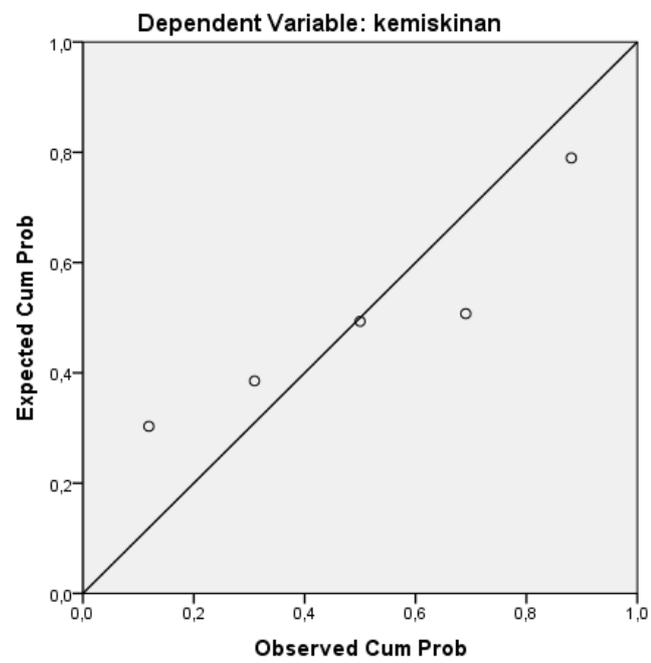
a. Dependent Variable: kemiskinan

Histogram

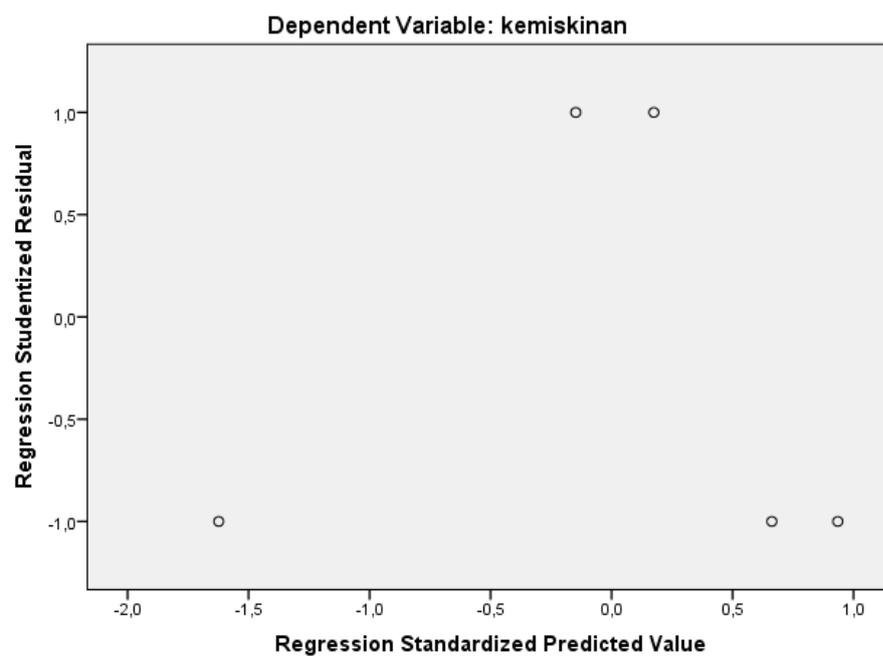
Dependent Variable: kemiskinan



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Harirah. Lahir di Maros pada tanggal 16 Juli 1998 yang merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Sabang dan Cendang. Penulis menyelesaikan pendidikan: MI DDI Cambalagi, lulus pada tahun 2009. Kemudian lanjut di MTS DDI Cambalagi, lulus pada tahun 2012. Kemudian lanjut di MA DDI Camabalagi, lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan dan diterima di UIN Alauddin Makassar untuk program strata satu Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada tahun 2015 hingga 2020.

Karya ilmiah yaitu penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pengaruh PDRB, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Maros” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pembimbing I yaitu Dr. Siradjuddin, SE., M.Si pembimbing II yaitu Mustafa Umar S.Ag., M.Ag.

Dr. Hasbiullah, SE., M.Si sebagai munaqisy I dan Sitti Aisyah S.Ag., M.Ag sebagai munaqisy II.